

2020-2024

# RENCANA STRATEGIS

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2020

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) PPS Bungus tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan agar membuat Renstra sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan 5 tahun, yang disusun mengacu kepada pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan atas jerih payah dari semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahkan dokumen Renstra ini. Semoga perikanan tangkap Indonesia semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan.

Bungus, 17 Juli 2020

Kepala Pelabuhan



Soma Somantri

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	4
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	5
<b>BAB I</b> .....	6
<b>PENDAHULUAN</b> .....	6
1.1. LATAR BELAKANG .....	6
1.2. KONDISI UMUM .....	7
1.3. TUGAS DAN FUNGSI .....	8
1.1.1. BIDANG OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN .....	9
1.1.2. SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA .....	10
1.1.3. SUB BAGIAN TATA USAHA .....	11
1.1.4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL .....	12
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN .....	13
1.5. ALUR PIKIR .....	13
<b>BAB II</b> .....	14
<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM</b> .....	14
2.1. PEMBANGUNAN NASIONAL .....	14
Visi Presiden .....	14
Misi Presiden .....	14
Tujuan Pembangunan Nasional .....	16
2.2. PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP .....	16
Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap .....	16
Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap .....	17
2.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap .....	17
2.4. Visi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus .....	18
2.5. Misi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus .....	18
2.6. Tujuan Pembangunan PPS Bungus .....	19
Sasaran Program .....	19
<b>BAB III</b> .....	22
<b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> .....	22
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan .....	22
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap .....	30
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi .....	33

3.4.	Kegiatan Prioritas DJPT Gambaran Umum.....	44
3.5.	Indikasi Pembangunan Kewilayahan.....	46
<b>BAB IV</b>	.....	<b>47</b>
<b>INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	.....	<b>47</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks Target Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2020-2024 .....	47
Tabel 2. Rencana Pendanaan Kegiatan dan Anggaran di PPS Bungus Tahun 2020-2024.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus .....	12
Gambar 2. Alur Pikir Penyusunan Resntra PPS Bungus .....	13
Gambar 3. Implementasi Pendekatan Supply-Demand terhadap Manajemen .....	33
Gambar 4. Pendekatan Perencanaan Strategis Sub Sektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, Serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024 .....	34
Gambar 5. Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial terhadap.....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pentingnya sektor kelautan dan perikanan telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Dalam undang-undang dimaksud disebutkan bahwa salah satu misi pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan erat secara langsung dengan agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah. Kegiatan pembangunan sub sektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 7,53 juta ton sampai tahun 2019.

## 1.2. KONDISI UMUM

Pengembangan, pembangunan, serta pengelolaan pelabuhan perikanan merupakan salah satu program pembangunan perikanan tangkap. Pelabuhan Perikanan memegang peranan yang strategis dalam pengembangan usaha perikanan laut maupun pengembangan masyarakat nelayan. Hal tersebut dimungkinkan karena pelabuhan perikanan merupakan pusat aktivitas masyarakat perikanan yang di dalamnya terdapat interaksi antar kelompok masyarakat perikanan.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus adalah salah satu dari 22 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus adalah salah satu dari 22 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. PPS Bungus terletak di Jl. Raya Padang-Painan KM. 16 Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Adapun dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus antara lain:

1. Undang-undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1985 tentang Pembinaan Kepelabuhan;
4. Peraturan Pemerintah No.62 tahun 2002 tentang tarif atas PNBPN pada DKP;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2006 tentang perubahan tarif atas jenis PNBPN pada DKP;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:PER.06/MEN/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.

### **1.3. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan perusahaan sebagai berikut :

#### **a. Fungsi Pemerintahan**

- ✓ Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- ✓ Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- ✓ Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- ✓ Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- ✓ Pelaksanaan kesyahbandaran;
- ✓ Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- ✓ Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawaskapal perikanan;
- ✓ Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- ✓ Pemantauan wilayah pesisir;
- ✓ Pengendalian lingkungan;
- ✓ Kepabeanan; dan/atau
- ✓ Keimigrasian.

## **b. Fungsi Pengusahaan**

- ✓ Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- ✓ Pelayanan bongkar muat ikan;
- ✓ Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- ✓ Pemasaran dan distribusi ikan;
- ✓ Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- ✓ Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- ✓ Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- ✓ Wisata bahari; dan/atau
- ✓ Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut :

### **1.1.1. BIDANG OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN**

#### **a. Tugas :**

Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas Seksi Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhan, kapal perikanan dan kesyahbandaran

#### **b. Fungsi :**

- ✓ Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- ✓ Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- ✓ Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
- ✓ Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- ✓ Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- ✓ Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- ✓ Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;

- ✓ Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
  - ✓ Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; dan
  - ✓ Pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan, kesyahbandaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelayanan usaha
- c. Seksi – Seksi dan Tugasnya :
- Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran terdiri atas:
- ✓ Seksi Operasional Pelabuhan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB; dan
  - ✓ Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat, Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan Log Book, penerbitan Surat Persetujuan, Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan, pengisian bahan bakar, bimbingan teknis, serta kegiatan, kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **1.1.2. SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA**

- a. Tugas:
- Melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan.
- b. Fungsi:
- Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana, pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; dan pelaksanaan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.
- c. Seksi-Seksi dan Tugasnya :

- ✓ Seksi Tata Kelola Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan.
- ✓ Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha.

### **1.1.3. SUB BAGIAN TATA USAHA**

#### **a. Tugas :**

Pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, dan anggaran, rumah tangga, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan Barang Milik Negara, pengendalian lingkungan, serta pelayanan masyarakat perikanan.

#### **b. Fungsi:**

Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan pengendalian lingkungan, pelaksanaan pelayanan masyarakat perikanan, pelaksanaan urusan rumah tangga dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelabuhan Perikanan.

#### **c. Sub Bagian dan Tugas nya :**

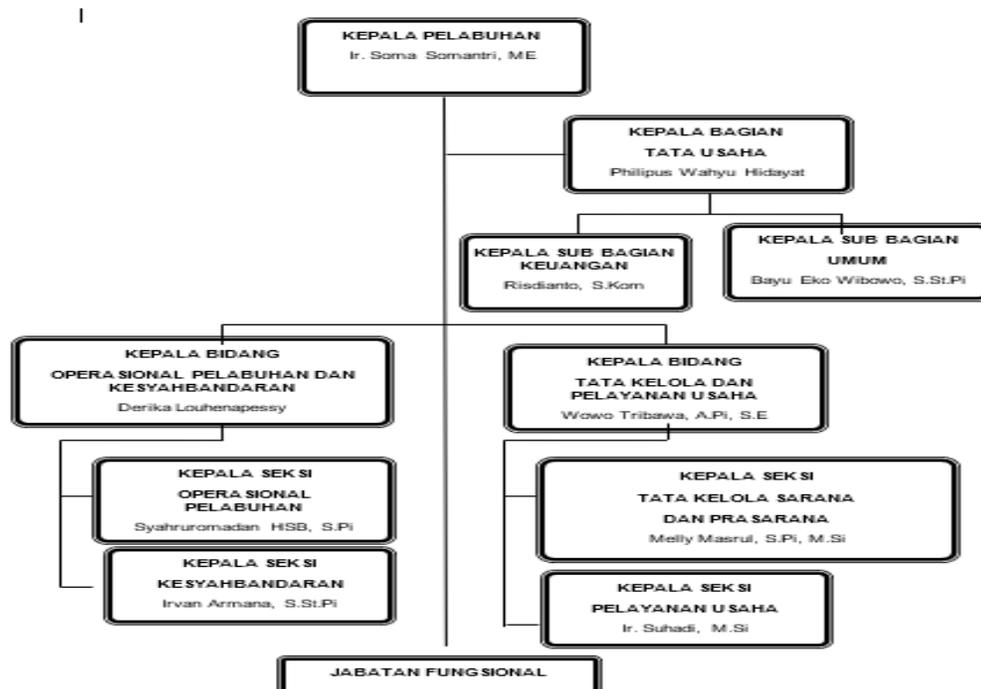
- ✓ Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- ✓ Subbagian Umum sebagaimana mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja), pengelolaan Barang Milik Negara, rumah tangga,

pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

#### 1.1.4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional dan peraturan perundang-undangan. Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut diatas PPS Bungus dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasikan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus



#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

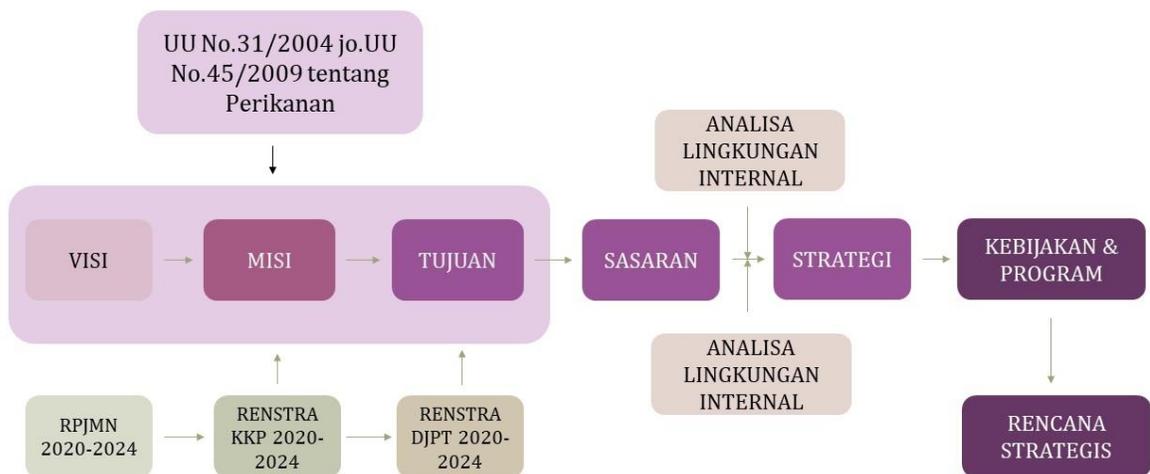
Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2020-2024, adalah sebagai acuan dan pedoman pengembangan dan pembangunan PPS Bungus berdasarkan tugas pokok dan fungsi, untuk mewujudkan visi perikanan tangkap periode kurun waktu 5 tahun ke depan yaitu tahun 2020 s/d 2024.

Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis dimaksud diuraikan kedalam program dan kegiatan dengan memperhitungkan peluang, tantangan, ancaman dan hambatan yang mungkin timbul. Rencana Strategis tersebut juga merupakan komitmen organisasi dan sekaligus diharapkan mampu memberikan motivasi dan petunjuk kepada *stakeholder* yang terlibat dalam aktivitas operasional pelabuhan.

#### 1.5. ALUR PIKIR

Alur pikir penyusunan Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tersaji pada Gambar berikut :

Gambar 2. Alur Pikir Penyusunan Resntra PPS Bungus



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM**

#### **2.1. PEMBANGUNAN NASIONAL**

##### Visi Presiden

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi pembangunan nasional 2020-2024 akan menggunakan Visi Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

##### Misi Presiden

Visi Presiden diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**

- Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak;
- Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan;
- Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan;
- Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
- Menumbuhkan Kewirausahaan;
- Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

#### **2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**

- Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila;
- Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur;
- Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0 Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru;

- Mempertajam Reformasi Struktural dan Fisik;
- Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan.

### **3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan**

- Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan;
- Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi;
- Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan;
- Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial;
- Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan Di pedesaan;
- Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga;
- Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah.

### **4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

- Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi;
- Mitigasi Perubahan Iklim;
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup.

### **5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa**

- Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Revitalisasi Revolusi Mental;
- Restorasi Toleransi dan Kerukuna Sosial;
- Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya;
- Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan;
- Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi.

### **6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya**

- Melanjutkan Penataan Regulasi;
- Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum;
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- Penghormatan,Perlindungan,dan Pemenuhan HAM;
- Mengembangkan Budaya Sadar Hukum.

### **7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh**

- Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif;
- Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional;

#### **8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**

- Aktualisasi Demokrasi Pancasila;
- Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional;
- Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi;
- Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien;
- Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Reformasi Pelayanan Publik.

#### **9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan**

- Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis;
- Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah;
- Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

#### **Tujuan Pembangunan Nasional**

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

### **2.2. PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP**

#### **Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong- Royong”. Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

## Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap;
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan.

### **2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap;
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.

### **3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan;
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan.

### **4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap.

## **2.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

- 1. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
- 2. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi;

peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.

3. **Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan**, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi.
4. **Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam mengedepankan strategi Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Business dan Pro Sustainable guna mendorong pemulihan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta memperhatikan lingkungan strategis yang bergerak dinamis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka dalam rangka mencapai visi yang tertuang dalam Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran program.

#### **2.4. Visi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus**

Visi PPS Bungus adalah sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan Kelautan dan Perikanan secara terpadu yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

#### **2.5. Misi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus**

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan perikanan tangkap, maka misi yang diemban adalah :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan;

2. Meningkatkan efisiensi usaha perikanan tangkap.

Terkait dengan Visi tersebut diatas maka pengelola PPS Bungus menetapkan beberapa misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan Perikanan yang memadai dan ramah lingkungan;
2. Meningkatkan produktifitas, nilai tambah (Value added) dan daya saing produk perikanan untuk kesejahteraan nelayan;
3. Meningkatkan pengembangan sistem data/infomasi perikanan yang jelas, akurat dan tertelusur.

#### **2.6. Arah dan Tujuan Pembangunan PPS Bungus**

Arah dan Tujuan pembangunan PPS Bungus secara konseptual merupakan pengejawantahan dari tugas pokok Pelabuhan Perikanan yang tertuang dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 20/PERMEN-KP/2014 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan yakni melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasi kapal perikanan. Berdasarkan tugas pokok tersebut yang diselaraskan dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan perikanan tangkap di PPS Bungus, antara lain :

1. Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan yang berwawasan lingkungan sesuai kebutuhan operasional;
2. Tersedianya produk perikanan bermutu, berdaya saing dan berkelanjutan untuk usaha perikanan;
3. Meningkatkan investasi usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan;
4. Tersedianya sistem informasi Pelabuhan Perikanan yang mudah diakses;
5. Meningkatnya kompetensi SDM di Pelabuhan Perikanan;
6. Meningkatnya kebersihan, keamanan, ketertiban, keselamatan kerja dan keindahan (K5) di Pelabuhan Perikanan.

Sasaran Program

Dalam mencapai visi, misi dan tujuan, PPS Bungus menetapkan sasaran program yaitu kondisi yang ingin dicapai PPS Bungus sebagai suatu outcome/impact dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pelabuhan perikanan. Pada tahun 2020-2024, PPS Bungus menetapkan 6 (enam) Sasaran Program, yaitu:

1. Pendapatan Nelayan Meningkatkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja meliputi :
  - Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap.
2. Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja meliputi :
  - Nilai PNBPN Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
3. Sumber Daya Ikan Berkelanjutan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja meliputi :
  - Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
4. Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung Jawab Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja meliputi :
  - Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial, Dan Perairan Kepulauan;
  - Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang Operasional.
5. Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja meliputi :
  - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
  - Jumlah Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
  - Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
  - Jumlah Awak Kapal Perikanan Yang Tersertifikasi/Terlindungi;
  - Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
  - Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan indikator kinerja meliputi :

- Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan**

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
  - a. Optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi:
    - 1) Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;
    - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
  - b. Penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dengan kegiatan utama meliputi:
    - 1) Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (Major Project) dengan berkoordinasi dengan K/LM terkait, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
    - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap; dan
    - 3) Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
  - c. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan kegiatan utama meliputi:
    - 1) Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas;
    - 2) Pengembangan lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya ikan;
    - 3) Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD); dan
    - 4) Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs).
  - d. Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi: perbaikan, penataan, dan

penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait.

- e. Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan dengan kegiatan utama meliputi:
  - 1) Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP;
  - 2) Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersana melalui pembentukan korporasi nelayan (Major Project) berkoordinasi dengan kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah;
  - 3) Pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi tanah nelayan; dan
  - 4) Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
  - a. Optimalisasi perikanan budidaya air payau melalui major project “Revitalisasi tambak dikawasan sentra produksi udang dan bandeng” berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
  - b. Pengembangan perikanan budidaya air Laut
  - c. Pengembangan perikanan budidaya air Tawar
  - d. Pengembangan budidaya ikan hias
  - e. Pengembangan budidaya rumput laut
  - f. Pengembangan pakan mandiri
  - g. Penataan perizinan usaha budidaya pusat dan daerah (Provinsi)
  - h. Pembangunan fasilitas perbenihan
  - i. Pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan
  - j. Produksi induk unggul dan benih bermutu
  - k. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor

- l. Sertifikasi cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara perbenihan ikan yang baik (CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB)
  - m. Sarana dan prasarana percontohan produksi serta usaha perikanan budidaya
  - n. Pembangunan infrastruktur perikanan budidaya antara lain meliputi saluran irigasi tambak dan keramba jaring apung
  - o. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
  - p. Sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya
  - q. Penguatan UPT perikanan budidaya
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan
  - b. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik (koridor)
  - c. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan
  - d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan
  - e. Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan
  - f. Pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah
  - g. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
  - h. Keikutsertaan dalam promosi skala internasional dan investasi
  - i. Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan
  - j. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri (Provinsi)
  - k. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen
  - l. Pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor
  - m. Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan
  - n. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP yang dirumuskan

- o. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan
  - p. Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP yang dibina
  - q. Kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste
  - r. Sarana rantai dingin dan peralatan pengolahan yang disediakan
  - s. Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina
  - t. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
  - u. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi
  - v. uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan
  - w. Sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan
  - x. Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
  - y. Penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan
  - z. Operasional pengawasan dan penjaminan mutu hasil produk
  - aa. Sarana dan prasarana pengujian mutu
  - bb. Penguatan UPT
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
  - b. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/ atau dimanfaatkan
  - c. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional
  - d. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari
  - e. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi
  - f. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/ terluar
  - g. Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya

- h. Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan dan/ atau rencana aksi pengelolaan
  - i. Pengelolaan Biofarmakologi
  - j. Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan
  - k. Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
  - l. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
  - m. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
  - n. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
  - o. Pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
  - p. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP yang efektif
  - q. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
  - r. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
  - s. Penyadarytahuan masyarakat KP dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab
  - t. Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik
  - u. Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri
  - v. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan karantina
  - w. Peningkatan UPT
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Hasil riset yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan dan sektor industri
  - b. Iptek hasil kegiatan riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP yang dimanfaatkan oleh masyarakat
  - c. c. SDM KP peserta diklat yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan)
  - d. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan
  - e. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri
  - f. Pelatihan masyarakat KP yang bersertifikasi kompetensi
  - g. Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
  - h. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP
  - i. Peningkatan UPT
6. Tatakelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Indeks Profesionalisme ASN
  - b. Indeks SPBE
  - c. Level maturitas SPIP
  - d. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP
  - e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP
  - f. Nilai / Predikat Sakip KKP

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama. Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatifadaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara

inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water) yang mencakup diantaranya: 1) Mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut; 2) Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; 3) Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut; 4) Mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan; 5) Melestarikan wilayah pesisir dan laut; 6) Mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih; 7) Meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan; 8) Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan; 9) Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan 10) Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

### **2. Gender**

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam

pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: 1) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 3) Penyiapan roadmap PUG; 4) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; 5) Pembuatan profil gender; dan 6) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

### **3. Modal Sosial Budaya**

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah 1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati; 2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan 3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

### **4. Transformasi Digital**

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek

pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data serta penataan sistem perizinan berbasis web (online), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui e-commerce.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap**

#### **Pendekatan Konseptual**

Pembangunan sebuah sub sektor harus mulai dikembangkan ke dalam proses yang lebih dinamis; mempertimbangkan isu terkini serta berupaya mengantisipasi tantangan di masa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan. Selain itu dalam kerangka sistem perencanaan nasional, pembangunan sebuah sub sektor juga sudah seharusnya memiliki referensi yang erat dengan pembangunan pada skala yang lebih luas yakni sektoral maupun nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional pada agenda 1 “memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan” dan agenda 2 “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan”. Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah. Adapun agenda pengembangan wilayah akan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Bisnis proses perikanan tangkap merupakan sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana usaha perikanan tangkap berjalan, mulai dari penjabaran kegiatan input, interaksi antar kegiatan, sampai pada alur pencapaian output dari pembangunan sub-sektor perikanan tangkap. Bisnis proses juga biasanya mengidentifikasi keterlibatan

stakeholder serta menjelaskan hubungan keterkaitannya. Dengan demikian hal tersebut menegaskan kembali bahwa dalam konteks perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap, penyertaan kerangka bisnis proses sebagai dasar menjadi bersifat mutlak.

Mengacu pada perkembangan terkini konsep pengelolaan perikanan, manajemen perikanan tangkap akan diperspektifkan ke dalam 3 aspek utama yakni: 1) Manajemen nelayan; 2) Manajemen sumber daya ikan; serta utilisasi keduanya melalui 3) Manajemen usaha penangkapan ikan, yang dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Manajemen Nelayan

Manajemen nelayan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni dukungan terhadap usaha perikanan nelayan serta dukungan terhadap social security nelayan. Dukungan usaha perikanan bertujuan untuk mengakselerasi usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, seperti misalnya perbaikan mindset, peningkatan kapasitas terhadap penggunaan teknologi, serta fasilitasi akses pendanaan.

Adapun dukungan terhadap social security bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga nelayan, melalui diversifikasi usaha serta fasilitasi penyaluran jaminan kesehatan, pendidikan, maupun perbaikan lingkungan permukiman nelayan. Manajemen nelayan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan kenelayanan.

#### 2. Manajemen Sumber Daya Ikan

Manajemen sumber daya ikan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni pengaturan alokasi (sumber daya ikan dan izin) serta pemantauan pelaksanaan perizinan. Pengaturan alokasi mencakup instrumen pengalokasian SDI dan izin oleh pemerintah pusat serta proses pemberian izin baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun upaya integrasi izin pusat daerah.

Adapun pemantauan pelaksanaan perizinan dilakukan melalui instrumen penerapan e-logbook, penempatan observer, serta peningkatan kepatuhan pada laporan LKU-LKP. Optimalisasi manajemen sumber daya

ikan, utamanya akan dapat tercapai seiring konsep pengelolaan berbasis WPP diterapkan secara penuh. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan kegiatan pengelolaan perizinan.

### 3. Manajemen Usaha Penangkapan Ikan

Manajemen usaha penangkapan ikan berisi segala mekanisme terkait pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan, sehingga sifatnya merepresentasikan irisan antara manajemen sumber daya ikan dan manajemen nelayan. Selain itu, manajemen usaha penangkapan ikan juga dapat dianggap sebagai ujung tombak sinergi antara penyediaan supply (sumber daya ikan) dan pemenuhan demand (hasil tangkapan ikan). Mengacu pada peran strategis tersebut, manajemen usaha penangkapan ikan sebenarnya menjadi tahapan yang paling penting dalam mencapai berbagai outcome pembangunan perikanan tangkap, yakni meliputi peningkatan kelestarian sumber daya ikan, pendapatan nelayan, daya saing hasil tangkapan, kontribusi ekonomi langsung, serta multiplier effect lainnya.

Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan dan kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. Semakin tingginya faktor permintaan terhadap produk perikanan serta adanya potensi keterbatasan dukungan ekosistem perikanan, seringkali semakin mendorong ketidakseimbangan terhadap usaha penangkapan ikan yang ideal.

Pembelajaran pada periode pembangunan sebelumnya tahun 2015-2019 semakin memperlihatkan bahwa tren pengelolaan perikanan tangkap di masa mendatang akan semakin mengerucut pada permasalahan supply dan demand. Untuk memenuhi keseimbangan supply-demand tersebut, hubungan 3 aspek utama dalam konsep manajemen perikanan harus berjalan secara seimbang, yakni antara aspek sosial, ekonomi serta aspek lingkungan ataupun seringkali direpresentasikan melalui hubungan

antara stakeholder nelayan, pengusaha, dengan pemerintah (**Gambar 3**). Penggunaan pendekatan supply-demand juga dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan utama industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Gambar 3. Implementasi Pendekatan Supply-Demand terhadap Manajemen Perikanan Tangkap



### 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi

Secara khusus, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan sub sektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke dalam 2 arah kebijakan yakni 1) Kebijakan Pokok dan 2) Kebijakan Pengarusutamaan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya.



Gambar 4. Pendekatan Perencanaan Strategis Sub Sektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, Serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024

### 1. Kebijakan Pokok

- Membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang factual. Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan: 1) Kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi sub bidang perikanan tangkap; 2) Konsultasi publik dengan stakeholder untuk perumusan kebijakan; 3) Pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan; 4) Koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; 5) Kunjungan kerja dan diskusi stakeholders di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara bertanggungjawab berbasis website dan transparansi, dan berbasis riset dan pengetahuan faktual.
- Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang berkelanjutan. Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - Optimalisasi Produktivitas Sarana Prasarana Perikanan Tangkap Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas

penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan. Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi sarana-prasarana penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan. Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya. Dalam upaya mewujudkan optimalisasi produktivitas sarana-prasarana perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- b) Peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- c) Peningkatan standarisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik tangkap dan laik simpan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- d) Peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- e) Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);

- f) Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;
- g) Optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- h) Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan :

- a) Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional;
- b) Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta;
- c) Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan;
- d) Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

## 2) Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap yang Terintegrasi

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Pengelolaan berbasis WPP pun mendorong secara spesifik peran infrastruktur perikanan tangkap, utamanya pelabuhan perikanan untuk semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan

tangkap di setiap WPP, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan prioritas “Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya. Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk :

Peningkatan mutu ikan dan penerapan standarisasi ramah lingkungan melalui Eco Fishing Port, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI;

- a) Penguatan SDM dan fungsi kesyahbandaran; intensifikasi pelibatan pemerintah daerah;
- b) Standarisasi ketersediaan-kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKOPP);
- c) Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- d) Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
- e) Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan adalah :

- a) Alternatif pembiayaan dalam pembangunan fisik infrastruktur pelabuhan perikanan;

- b) Sinergitas beberapa regulasi sebagai landasan pengembangan PP; terkait
  - a) Pemerintahan Daerah, khususnya pada proses pengalihan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) PP dan b) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);
  - c) Optimalisasi peningkatan peran PP sebagai sentra ekonomi dan pusat aktivitas nelayan; utamanya untuk memudahkan fungsi kontrol pemerintah;
  - d) Intensifikasi tata kelola pengembangan PP secara nasional, baik yang melalui penganggaran APBN KKP, DAK, APBD maupun swasta.
- 3) Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPP telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPP diarahkan untuk berperan sebagai management authority yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPP, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, serta sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPP.

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokuslokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan umum daratan; mempertimbangkan tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan umum daratan seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol. Di sisi lainnya peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus

didorong melalui perluasan cakupan penerapan e-logbook serta penempatan observer on board pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan operasionalisasi lembaga WPP dalam pengawasan, pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat-daerah dan antardaerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;
- b) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan e-logbook secara nasional untuk kapal > 5 GT, serta perluasan cakupan observer di atas kapal perikanan;
- c) Penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;
- d) Peningkatan produktivitas perairan umum daratan, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat);
- e) Peningkatan produktivitas ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO; dan
- f) Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (traceability) hasil tangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan :

- a) Penguatan basis data pengalokasian SDI; intensifikasi koordinasi dengan otoritas penyusun stok SDI dan akademisi (backward linkage);
- b) Penguatan fungsi manajemen pemanfaatan SDI melalui pengendalian perairan overfishing dan optimalisasi perairan underfishing; Intensifikasi koordinasi dengan unit kerja pemanfaatan usaha (forward linkage), seperti dalam alokasi izin, kapal, dan pengembangan PP;
- c) Intensifikasi koordinasi dengan Pemda terkait operasionalisasi WPP, penyelesaian andon, pemanfaatan perairan umum daratan;

d) Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap.

Upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselerasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPP, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni antar K/L (KKP dan Kemenhub) maupun antara pusat-daerah (KKP dan Pemda). Dengan cakupan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pemutakhiran penggunaan e-service dan platform yang terintegrasi perlu terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang real-time, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk :

- a) Peningkatan dan penyebarluasan SILAT;
- b) Sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kemenhub, termasuk upaya integrasi maupun intensifikasi pelaksanaan gerai di daerah;
- c) Sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- d) Pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan e-services;
- e) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- f) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan :

- a) Sinergitas regulasi terkait Pemerintahan Daerah; kewenangan perizinan dan penerbitan BPKP oleh pemerintah daerah;
  - b) Sinergitas peraturan daerah (Perda) terkait sistem perizinan, dalam upaya mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah;
  - c) Inovasi teknologi dalam pelaporan usaha untuk meningkatkan kualitas data pemanfaatan SDI dan potensi pendapatan negara.
- 4) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan

Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, namun dengan beberapa catatan seperti perlunya pelibatan aktif pemerintah daerah maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar lebih memperhatikan perspektif stakeholder utama nelayan serta memposisikan DJPT bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan social security masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin, termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan, mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis, nelayan akan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus untuk membentuk jaring pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi force majeure seperti bencana alam.

Dalam hal ini peran DJPT perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayanan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah. Dalam upaya

pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk :

- a) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- b) Perlindungan dan bantuan nelayan melalui bantuan premi asuransi nelayan, termasuk perluasan skema asuransi mandiri, bantuan sarana penangkapan ikan, dll;
- c) Pemberdayaan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- d) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), dll;
- e) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan dan intensifikasinya termasuk melalui akses LPMUKP dan sertifikasi hak atas tanah nelayan, serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan; dan
- f) Penguatan informasi kenelayanan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan :

- a) Penguatan database kenelayanan untuk menjaring kerjasama pemberdayaan-perlindungan nelayan dengan lintas sektor, pemda, swasta;
- b) Penguatan jalur & mekanisme komunikasi dengan nelayan untuk pemetaan kebutuhan nelayan secara tepat dan responsif;
- c) Mengarusutamakan nelayan sebagai subjek pemberdayaan, melalui perubahan mindset dan kapasitas nelayan untuk mandiri; bukan lagi hanya sebagai objek;
- d) Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas  
Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui

5 pendekatan, yaitu: 1) Human Capital; 2) Organisation Capital (Right Sizing Organisation); 3) Financial and Planning Capital; 4) Information Capital, serta 5) Control Capital.

Di masa mendatang, tantangan sub-sektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai unit kerja think-tank; berperan dalam memberikan berbagai saran-pertimbangan, memberikan respon cepat (quick analysis), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk: 1) Peningkatan inovasi program; 2) Intensifikasi manajemen berbasis IT; 3) Peningkatan skala kerjasama bidang perikanan tangkap baik di lingkup KKP (antar Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta); 4) Penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan; 5) Harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan 6) Penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

Gambar 5. Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap

K/L LAIN	PEMDA	KKP
<b>PU-PERA</b> Jalan / Rumah / Dermaga Pelabuhan / air bersih	Penyiapan lahan	Tata ruang/zonasi/masterplan
<b>KEMEN-ATR</b> Sertifikasi Tanah Nelayan	Identifikasi permasalahan di daerah	Sarana Sistem Rantai Dingin
<b>KEMENDAGRI</b> Percepatan P3D, sinergi pusat-daerah	Identifikasi / pengurusan administrasi / penyaluran bantuan	Penyuluhan, Pelatihan, Penguatan kelembagaan kelompok
<b>KEMEN-KOPERASI</b> Pembentukan / Pembinaan Koperasi	Manajemen data kelelayanan	Riset teknologi perikanan tangkap
<b>KEMHUB</b> Pengukuran GT, dokumen kapal	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP	Pengawasan SDKP
<b>KEMENDES</b> Sinergi dana desa, desa nelayan	Sinergi pembiayaan kegiatan prioritas nasional di daerah	Sarana Pemasaran
<b>KEMENKOMAR</b> Koordinasi / sinkronisasi, peluang investasi	Menggalang dukungan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya	<b>BUMN</b>
	Integrasi sistem perizinan	<b>Swasta</b>
	Pengembangan pelabuhan	

## 2. Kebijakan Pengarusutamaan

- a. Tujuan Pembangunan berkelanjutan Strategi pelaksanaan meliputi: 1) Penerapan konsep ekonomi hijau; 2) Penerapan konsep eco fishing port; 3) Alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; 4) Inovasi teknologi API ramah lingkungan.
- b. Gender Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.
- c. Modal sosial budaya Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.
- d. Transformasi digital Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (e-logbook, e-services perizinan, e-layar, dll).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan multiplier effect pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada stakeholder.

Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

### 3.4. Kegiatan Prioritas DJPT Gambaran Umum

Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), merupakan platform pengajuan izin usaha perikanan tangkap yang memungkinkan penerbitan izin dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, dan keseluruhan prosesnya dilakukan secara online. Intensifikasi penggunaan serta berbagai pemutakhiran sistem perizinan masih terus akan

dilakukan. Upaya reformasi perizinan ini merupakan salah satu gebrakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi perikanan tangkap. Pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol. Peluang pemanfaatan investasi tuna diprediksi dapat mencapai Rp 7 Triliun. Seiring upaya diplomasi yang terus diintensifikasi dengan pengelola perikanan regional-RFMO, upaya peningkatan investasi-industrialisasi serta peningkatan kapasitas nelayan lokal pada komoditas TCT terus diakselerasi. Penyederhanaan regulasi. Dalam rangka mewujudkan usaha penangkapan ikan yang berkeadilan serta iklim investasi yang baik, sejumlah peraturan disederhanakan dan beralih pada hukum positif. Beberapa substansi penyederhanaan utama meliputi kemudahan perizinan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, kemudahan transshipment, batasan ukuran kapal yang lebih berdaya saing di ZEEI-laut lepas serta lebih melindungi nelayan kecil di perairan kepulauan. Pelabuhan Perikanan Unggul. Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan 42 | Page serta ketetelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) Eco Fishing Port, yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan. Kampung Nelayan Maju. Konsep perwujudan lingkungan permukiman nelayan yang maju, bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya.

Salah satu strategi pengembangannya adalah melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan kawasan wisata bahari-kuliner. Armada Perikanan yang Kompetitif. Untuk mewujudkan industrialisasi perikanan, diperlukan armada perikanan (kapal perikanan, alat penangkapan ikan, awak kapal perikanan), serta manajemennya yang kompetitif. Konsep yang diusung yakni pemenuhan aspek ketertelusuran (traceability), standar keamanan kapal, penanganan ikan (fish handling), serta standar keselamatan kerja.

### **3.5. Indikasi Pembangunan Kewilayahan**

Sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024 bahwa pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional harus berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Dengan demikian pada bagian ini akan disajikan indikasi pembangunan perikanan tangkap tahun 2020-2024 berbasis kewilayahan berdasarkan: 1) Data Eksisting, yaitu sebaran 538 Pelabuhan Perikanan per WPP serta sebaran kapal perikanan perizinan pusat per WPP; maupun 2) Data Proyeksi, terdiri dari pertumbuhan volume produksi per provinsi, pertumbuhan nilai produksi per provinsi, pertumbuhan jumlah nelayan per provinsi, pertumbuhan NTN per provinsi, pertumbuhan volume produksi per WPP, produksi komoditas TCT per WPP, serta produksi komoditas utama per WPP.

## BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Indikator Kinerja Tahun 2020-2024 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah ditetapkan sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 1 Matriks Target Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2020-2024

KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
SP-1	Pendapatan Nelayan Meningkatkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap (Nelayan)	50	50	50	75	75
SP-2	Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nilai PNBP Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	780,6	1.000	1.000	1.000	1.000
SP-3	Sumber Daya Ikan Berkelanjutan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Unit)	120	150	150	150	150
SP-4	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung Jawab Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial, Dan Perairan Kepulauan (Persen)	100	100	100	100	100
		Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang Operasional (WPP)	1	1	1	1	1
SP-5	Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	3.500	4.336	4.769	5.245	5.770

		Jumlah Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Lokasi)	1	1	1	1	1
		Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75	79	80	80	81
		Jumlah Awak Kapal Perikanan Yang Tersertifikasi/Terlindungi (Orang)	32	32	32	32	32
		Permesinan Kapal Perikanan Yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Lokasi)	1	1	1	1	1
		Persentase Penyampaian Informasi Perizinan Pusat - Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	100	100	100	100	100
SP-6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	45,10	75	75	85	85
		Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	72	72	72	72	72
		Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	85	85	85	85	85
		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	88	88	89	90	90

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2020-2024, maka diperlukan pendanaan baik dari APBN. Adapun kegiatan dan anggaran Tahun 2020-2024 Pelabuhan Perikanan Samudera untuk Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Pendanaan Kegiatan dan Anggaran di PPS Bungus Tahun 2020-2024

NO	Program/Kegiatan (output)	Satuan	Target					Alokasi Anggaran (juta rupiah)					Lokasi	APBN (Pusat/TP/DK)
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>1. Pengelolaan Sumber Daya Ikan</b>														
1	Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya	Kegiatan	1	1	1	1	1	5.994.000	6.593.000	7.252.000	7.978.000	8.775.000	PPS Bungus	Pusat
2	Kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan	Unit	120	150	150	150	150	227.482.000	250.230.000	275.253.000	302.778.000	333.056.000	PPS Bungus	Pusat
3	Pertemuan Kelembagaan pengelolaan perikanan WPPNRI 572	WPP	1	1	1	1	1	120.000.000	132.000.000	145.200.000	159.720.000	175.692.000	PPS Bungus	Pusat
<b>2. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</b>														
1	Sertifikasi awak kapal perikanan di daerah	Orang	12	12	12	12	12	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	PPS Bungus	Pusat
2	Sosialisasi permesinan kapal perikanan yang memenuhi standart keselamatan dan operasional	Provinsi	1	1	1	1	1	40.900.000	40.900.000	40.900.000	40.900.000	40.900.000	PPS Bungus	Pusat
3	Sosialisasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL)	Orang	12	12	12	12	12	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	PPS Bungus	Pusat
<b>3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan</b>														
1	PPS yang meningkat fasilitasnya	Lokasi	1	1	1	1	1	1.901.928.000	30.534.457.283	6.211.813.000	24.525.744.346	3.000.000.000	PPS Bungus	Pusat
2	PPS yang meningkat operasionalnya	Kali	12	12	12	12	12	1.050.000.000	1.155.000.000	1.270.500.000	1.397.550.000	1.537.305.000	PPS Bungus	Pusat
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	700.000.000	621.601.910	657.001.910	692.401.910	727.801.910	PPS Bungus	Pusat
<b>4. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan</b>														
1	Pembinaan dan Implementasi Integrasi Sistem Perizinan Pusat-daerah	Provinsi	1	1	1	1	1	37.455.000	41.200.000	45.320.000	49.852.000	54.837.000	PPS Bungus	Pusat
2	Fasilitas kredit penangkapan ikan	Kali	12	12	12	12	12	4.000.000	4.400.000	4.840.000	5.320.000	5.856.000	PPS Bungus	Pusat
<b>5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</b>														
1	Layanan Dukungan Manajemen Esselon I	Layanan	1	1	1	1	1	550.694.000	578.228.700	607.140.135	637.497.142	669.371.999	PPS Bungus	Pusat
2	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	9.103.980.000	10.014.400.000	11.015.000.000	12.110.000.000	13.300.000.000	PPS Bungus	Pusat

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020–2024 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Ditjen Perikanan Tangkap, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya. Renstra Pelabuhan Perikanan Bungus, Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Ditjen Perikanan Tangkap.

Sehubungan dengan, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi. Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh jajaran pegawai pelabuhan, instansi terkait dan stakeholder dikawasan pelabuhan perikanan. Kerja keras dari seluruh pimpinan dan staf Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Ditjen Perikanan Tangkap dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Ditjen Perikanan Tangkap yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.